

Evaluasi Kebijakan Stiker Keluarga Miskin Di Kota Surabaya (Studi Pada Kelurahan Gunung Sari)

An Evaluation of the Poor Household Sticker Policy in Surabaya City (Case Study in Gunung Sari Subdistrict)

Nurhaya Fadiah

Program Studi Sajana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email¹: nurhaya.21002@unesa.ac.id

Agus Prastyawan

Program Studi Sajana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email²: agusprastyawan@unesa.ac.id

Abstrak

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu penting yang dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kota Surabaya. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah ini adalah melalui program penempelan stiker keluarga miskin sebagai bentuk identifikasi penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bagaimana Evaluasi Kebijakan Stiker Keluarga Miskin di Kota Surabaya (Studi Pada Kelurahan Gunung Sari). Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan stiker keluarga miskin dengan menggunakan kriteria evaluasi oleh Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi efektivitas, kebijakan belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya sistem pelaporan pelepasan stiker yang tertib. Dari aspek efisiensi, pelaksanaan dinilai hemat sumber daya karena menggunakan tenaga dan waktu dari struktur masyarakat yang sudah ada. Kecukupan kebijakan masih dipertanyakan karena belum seluruh penerima stiker memperoleh bantuan, serta menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Dalam hal pemerataan, masih terdapat ketimpangan, khususnya bagi warga yang tinggal di kos atau kontrakan yang sulit dijangkau kebijakan. Dari segi responsivitas, muncul penolakan masyarakat terhadap stiker karena alasan stigma dan kurangnya partisipasi. Sementara pada kriteria ketepatan, pemasangan dinilai cukup tepat sasaran, tetapi pelepasan stiker tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi warga secara nyata. Secara keseluruhan, kebijakan ini masih memerlukan perbaikan agar lebih adil, tepat sasaran, dan diterima masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Stiker Keluarga Miskin

Abstract

Poverty remains a significant issue faced by various regions, including Surabaya City. One of the government's efforts to address this issue is the implementation of the poor family sticker program as a form of identification for aid recipients. This study aims to analyze the evaluation of the Poor Family Sticker Policy in Surabaya City, with a case study conducted in Gunung Sari Subdistrict. The research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The focus of this study is the policy evaluation using William N. Dunn's criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results show that in terms of effectiveness, the policy has not been optimal due to limited public understanding and the absence of a structured reporting system for sticker removal. In terms of efficiency, implementation is considered cost-effective by utilizing existing community resources. The adequacy of the policy is still in question, as not all sticker recipients receive aid, and the sticker can create social discomfort. Regarding equity, disparities remain, especially for residents living in rented or boarding houses who are harder to reach. In terms of responsiveness, public rejection of the sticker is evident due to stigma and lack of participation. For appropriateness, the placement of stickers is generally on target, but sticker removal does not always reflect actual economic conditions. Overall, this policy still requires improvements to be more equitable, targeted, and accepted by the community.

Keywords : *Policy Evaluation, Poor Family Sticker.*

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan global yang dihadapi hampir semua negara, baik berkembang maupun maju. Di Indonesia, isu kemiskinan menjadi perhatian utama dalam setiap periode pembangunan nasional karena berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Fitri et al., 2024). Menurut Kumaat dalam (Andrianus & Alfatih, 2023) selama lima tahun terakhir penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung berjalan lambat. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam tingkat kemiskinan ekstrem setelah Laos, serta menjadi negara dengan jumlah kasus kemiskinan ekstrem terbanyak, yaitu sekitar 10,5 juta jiwa yang masuk dalam kategori ekstrem. Permasalahan kemiskinan tersebut telah menjadi perhatian serius pemerintah yang tertuang dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan membutuhkan penanganan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh guna mengurangi beban masyarakat serta memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Gambar 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin menurut Pulau



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dilansir dari Badan Pusat Statistik Pulau Jawa, sebagai wilayah dengan populasi tertinggi, menyumbang angka kemiskinan nasional terbesar. Kota Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan kota metropolitan kedua setelah Jakarta, turut menghadapi tantangan ini. Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2020 hingga 2024, data BPS menunjukkan masih terdapat 116,62 ribu jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Kota Surabaya merespons kondisi tersebut dengan menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Salah satu bentuk intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah kebijakan penempelan stiker pada rumah keluarga miskin, yang mulai diterapkan sejak tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, mendorong transparansi, serta mempercepat proses verifikasi data penerima manfaat. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat, mulai dari dukungan hingga penolakan akibat stigma sosial yang muncul.

Gambar 2 Stiker Keluarga Miskin



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2024

Implementasi dari adanya stiker keluarga miskin telah dilakukan beberapa daerah lainnya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utari et al., 2024) kebijakan labelisasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima Bantuan PKH di Kecamatan Tanjung Pinang Timur, terdapat hambatan dan masalah-masalah, seperti warga yang mengundurkan diri dari anggota PKH dan tidak bersedia diberikan label. Namun, karena mengetahui tulisan label PKH hanya bertuliskan "pra sejahtera" bukan masyarakat miskin mereka meminta untuk diberikan labelisasi kembali. Selain itu, banyak anggota PKH yang tidak sesuai,

tetapi menyetujui rumahnya diberikan label. Selanjutnya anak dari keluarga yang diberikan label merasa malu karena rumahnya diberikan label. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan (Hidayat et al., 2022) mengenai pemberian label miskin kepada Keluarga Penerima Bantuan PKH di Jorong Tanjung Durian Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan mengakibatkan Keluarga Penerima PKH merasa canggung dalam masyarakat dan diremehkan serta merasa canggung dalam masyarakat.

Kelurahan Gunung Sari, yang terletak di Kecamatan Dukuh Pakis, merupakan salah satu dari 154 kelurahan yang ada di Kota Surabaya, dan turut serta berperan aktif dalam kebijakan stiker keluarga miskin yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kelurahan Gunung Sari menempati urutan kedua sebagai kelurahan dengan jumlah keluarga miskin terbanyak di Kecamatan Dukuh Pakis. Pelaksanaan pemberian stiker keluarga miskin di Kelurahan Gunung Sari dimulai pada bulan Januari Tahun 2023. Sesuai dengan arahan Dinas Sosial Kota Surabaya Kelurahan Gunung Sari membantu melakukan penempelan stiker pada Keluarga Miskin yang masuk kedalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada tahun 2023 di Kelurahan Gunung Sari terdapat sebanyak 646 stiker keluarga miskin telah terpasang di wilayah Kelurahan Gunung Sari. Namun, pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi pemasangan stiker bagi Keluarga Miskin yang dilakukan oleh Kelurahan Gunung Sari, dikarenakan sudah tidak ada lagi distribusi stiker baru Dinas Sosial Kota Surabaya. Meskipun kebijakan pemasangan stiker pada keluarga yang tergolong keluarga miskin telah dihentikan, keluarga yang masuk dalam kategori keluarga miskin, tetap dapat dilakukan verifikasi dan identifikasi secara daring melalui website resmi Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu <https://sikeluargamiskin.surabaya.go.id>.

Sementara itu, pada tanggal 22 hingga 25 agustus 2024, Kelurahan Gunung Sari tetap melakukan upaya penyesuaian terhadap keberadaan stiker keluarga miskin yang masih tertempel di rumah-rumah warga. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pelepasan stiker di rumah keluarga yang telah mengalami peningatan tingkat kesejahteraannya menjadi keluarga pra-sejahtera. Kegiatan pelepasan stiker didokumentasikan melalui unggahan resmi akun instagram resmi @kantor_kelurahan_gunungsari. Upaya ini dilakukan Kelurahan Gunung Sari menunjukkan bahwa terdapat komitmen kelurahan untuk memperbarui data warga secara lebih akurat.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan diketahui stiker keluarga miskin yang sudah dilepas sebanyak 140 stiker. Jumlah ini diperoleh melalui penghitungan secara manual yang dilakukan oleh peneliti dari stiker yang telah dilepas, dikarenakan kelurahan belum memiliki pendataan yang jelas dan terstruktur terkait pelepasan stiker. Selain itu, Ketua Kesra menyampaikan, bahwa jumlah tersebut bisa dipastikan lebih dari angka tersebut dikarenakan saat proses

melakukan pelepasan stiker terdapat masyarakat yang sudah melakukan pelepasan secara mandiri tanpa adanya pelaporan ke pihak kelurahan. Dalam konteks ini, kebijakan penempelan stiker merupakan bagian dari kebijakan publik, yaitu serangkaian keputusan atau tindakan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat (Husin, 2023). Menurut Dunn (Dunn, 2003) kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang saling berkaitan dan diambil oleh lembaga pemerintahan dalam berbagai bidang, termasuk kesejahteraan sosial. Chandler dan Plano menekankan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya untuk mengatasi persoalan kolektif yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik memiliki beberapa ciri utama, yaitu memiliki tujuan dan disusun melalui proses politik yang terencana, tidak berdiri sendiri, tindakan nyata dari pemerintah, memiliki siat pasif, serta berdasarkan hukum Affrian dalam (Dewi, 2022). Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik juga melalui tahapan penting, mulai dari perumusan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Dengan demikian, kebijakan penempelan stiker keluarga miskin dapat dikaji melalui kerangka teori kebijakan publik, khususnya pada tahap implementasi dan evaluasi

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengevaluasi pelaksanaan kebijakan stiker keluarga miskin di Kota Surabaya, dengan fokus khusus pada Kelurahan Gunung Sari sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penerima stiker terbanyak. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan awalnya, bagaimana proses implementasinya dilakukan di tingkat kelurahan, serta dampaknya terhadap masyarakat penerima. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: "Evaluasi Kebijakan Stiker Keluarga Miskin di Kota Surabaya (Studi pada Kelurahan Gunung Sari)".

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dan faktual, tanpa menguji hipotesis atau hubungan sebab-akibat. Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana kebijakan stiker keluarga miskin diterapkan di Kelurahan Gunung Sari, serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, karena wilayah ini menjadi salah satu lokasi pelaksanaan kebijakan penempelan stiker keluarga miskin. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan kunci seperti pejabat kelurahan, Kader Surabaya Hebat (KSH), masyarakat yang rumahnya ditempeli stiker, masyarakat yang telah dilepas stikernya, serta warga yang menolak ditempeli stiker.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti surat edaran Kementerian Sosial, Peraturan Wali Kota Surabaya, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata terkait implementasi kebijakan, sedangkan wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan. Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk menguatkan data yang diperoleh, baik berupa dokumen resmi maupun catatan visual dan arsip kebijakan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh proses analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh data yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

a. Efektifitas (*Effectiveness*)

Efektivitas (*Effectiveness*) menurut Dunn didefinisikan sebagai seberapa besar kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas bertumpu pada perbandingan antara hasil aktual yang dicapai. Dalam konteks kebijakan stiker keluarga miskin di Kota Surabaya, tujuan utama kebijakan ini adalah sebagai alat penanda visual bagi rumah tangga miskin yang telah terverifikasi dalam data Dinas Sosial Kota Surabaya. Fungsi stiker tidak hanya sebagai indikator administratif, tetapi juga sebagai instrumen transparansi publik serta penunjang efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Efektivitas kebijakan stiker keluarga miskin ini dapat diukur dari sejauh mana tujuan tersebut dipahami oleh pihak pelaksana dan masyarakat, serta dari sejauh mana kebijakan ini dilaksanakan dengan prosedur yang sistematis, akurat, dan berkelanjutan.ungsi stiker tidak hanya sebagai indikator administratif, tetapi juga sebagai instrumen transparansi publik serta penunjang efektivitas penyaluran bantuan sosial. Ketentuan mengenai pemasangan stiker ini diatur secara dalam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Seksi Kesejahteraan dan Perekonomian (Kesra) Kelurahan Gunung Sari, diketahui bahwa pihak kelurahan memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan kebijakan penempelan stiker. Informan menyampaikan bahwa stiker keluarga miskin berfungsi sebagai penanda rumah tangga miskin yang datanya tercatat dalam aplikasi *SiKeluargaMiskin* milik Dinas Sosial. Pemahaman serupa juga disampaikan oleh Kader Surabaya Hebat (KSH) yang terlibat dalam kegiatan pemasangan maupun pelepasan stiker. Kader menyatakan bahwa penempelan stiker ditujukan untuk menandai keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan agar program pemerintah tepat sasaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa di tingkat pelaksana, baik dari unsur pemerintahan kelurahan maupun kader masyarakat, telah terdapat pemahaman yang

relatif sesuai dengan maksud kebijakan. Dalam kerangka evaluasi menurut Dunn, hal ini mencerminkan adanya tercapainya tujuan di level pelaksana, di mana tindakan yang dilakukan telah mencerminkan maksud kebijakan secara umum. Namun demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya semata-mata bergantung pada pemahaman pelaksana, tetapi juga perlu pemahaman masyarakat sebagai pihak yang menjadi objek kebijakan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara pelaksana dan masyarakat, yang dalam hal ini menghambat ketercapaian tujuan kebijakan secara menyeluruh. Dalam kerangka teori Dunn, efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya hasil kebijakan di atas kertas, tetapi juga dari sejauh mana hasil tersebut mencerminkan pencapaian tujuan secara menyeluruh. Ketika masyarakat sebagai sasaran utama tidak memahami makna dan fungsi dari kebijakan, maka implementasi kebijakan berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi, termasuk kemungkinan penolakan.

Selain itu, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelepasan stiker belum didukung oleh sistem pelaporan yang tertib dan terdokumentasi. Peneliti menemukan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum tersedia berita acara atau dokumen resmi mengenai pelepasan stiker. Ketua Kesra Kelurahan Gunung Sari menyampaikan bahwa pada awal pelaksanaan memang terdapat berita acara pemasangan stiker, tetapi untuk pelepasan belum tersedia format atau prosedur baku ataupun resmi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual di lapangan. Peneliti juga harus melakukan penghitungan manual sterhadap jumlah rumah yang stikernya telah dilepas dan mendapati sebanyak 140 rumah sudah dilakukan pelepasan stiker oleh pihak Kelurahan Gunung Sari. Namun demikian, jumlah ini belum mencerminkan kondisi aktual karena terdapat pelepasan stiker yang dilakukan sendiri oleh warga tanpa pelaporan kepada pihak kelurahan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan (Ramadhan et al., 2024), pada penelitiannya masyarakat menilai bahwasannya variabel efektivitas sebagai salah satu aspek yang paling lemah, stikerisasi di Surabaya dinilai rendah oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pemantauan, minimnya pelibatan masyarakat, serta kurangnya mekanisme dokumentasi, yang juga merupakan kendala utama yang ditemukan di Kelurahan Gunung Sari.

b. Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn, efisiensi (*efficiency*) diartikan sebagai perbandingan antara hasil (output maupun outcome) yang diperoleh dari suatu kebijakan dengan total sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapainya. Pelaksanaan kebijakan stiker keluarga miskin di Kota Surabaya, khususnya di Kelurahan Gunung Sari, menunjukkan kriteria efisiensi yang sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dijalankan tanpa adanya alokasi anggaran khusus, dalam

kegiatan pemasangan maupun pelepasan stiker. Berdasarkan wawancara dengan pihak kelurahan dan Kader Surabaya Hebat (KSH), diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya hanya menyediakan stiker sebagai alat utama, sedangkan seluruh proses pelaksanaan mulai dari pendataan, distribusi, hingga pemasangan dan pelepasan stiker dilakukan oleh aparat kelurahan serta kader masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia. Dengan begitu, hal ini sejalan dengan yang disampaikan Dunn, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai efisien, karena dengan input yang sangat terbatas tetap mampu menghasilkan output yang diharapkan.

Namun, dari penelitian yang telah dilakukan peneliti juga menemukan bahwa efisiensi tidak berlangsung merata di seluruh wilayah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan, ditemukan adanya kendala pelaksanaan di beberapa RW, yang memerlukan waktu lebih lama karena kondisi wilayah dan jumlah keluarga miskin yang tertempel cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh konteks lokal. Meski begitu, tidak adanya tenggat waktu dari Dinas Sosial justru memungkinkan pelaksanaan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang dapat memudahkan efisiensi dalam konteks kebijakan publik berbasis wilayah.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakan stiker keluarga miskin di Kelurahan Gunung Sari menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan ini dijalankan dengan sumber daya yang telah ada, tetapi mampu mencapai tujuannya terutama dalam hal penempelan stiker. Efisiensi dibuktikan dari tidak adanya pemakaian anggaran khusus, optimalisasi sumber daya manusia yang ada, fleksibilitas waktu pelaksanaan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Sesuai dengan pendekatan evaluasi Dunn, kebijakan ini dapat dikategorikan efisien karena memenuhi prinsip dasar pemanfaatan sumber daya secara maksimal untuk hasil yang optimal.

c. Kecukupan (*Adequacy*) :

Mengacu pada kriteria kecukupan oleh Dunn, kecukupan (*adequacy*) diartikan seberapa jauh kebijakan dapat mengatasi masalah pada sasaran yang telah ditentukan secara memadai. Kecukupan menilai apakah solusi yang diberikan oleh kebijakan sudah cukup kuat dan sesuai untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan stiker keluarga miskin di Kelurahan Gunung Sari, kriteria kecukupan ini berkaitan dengan sejauh mana keberadaan stiker benar-benar mampu membantu proses identifikasi keluarga miskin serta mendorong transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini dinilai cukup membantu pihak kelurahan dan kader di lapangan untuk mengidentifikasi status ekonomi masyarakat. Stiker yang ditempel di rumah warga berfungsi sebagai penanda visual, sehingga memudahkan petugas dan masyarakat

sekitar untuk mengetahui siapa saja yang tergolong keluarga miskin. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Utari et al., 2024) yang menjelaskan bahwa dengan adanya labelisasi yang dilakukan pada rumah warga penerima manfaat PKH dilakukan dengan rujuan sebagai transparansi bagi masyarakat penerima bantuan.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa kebijakan sudah memiliki sistem yang cukup mendukung proses identifikasi secara teknis dan administratif. Namun, terdapat pula pandangan berbeda, seperti beberapa yang menyampaikan menyampaikan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka. Misalnya, ada warga yang mengaku telah ditempel stiker namun tidak pernah menerima bantuan apa pun. Sebagian warga juga merasakan ketidaknyamanan akibat pemasangan stiker tersebut karena dianggap memalukan atau menimbulkan stigma negatif. Bahkan ada warga yang menolak rumahnya ditempel stiker karena menganggap bentuk penandaan seperti itu tidak efektif dan tidak menjawab kebutuhan esensial masyarakat miskin.

Dalam pandangan Dunn, kecukupan tidak hanya berbicara tentang “cukup atau tidaknya” suatu kebijakan dari sudut pandang pelaksana, tetapi juga dari sudut pandang penerima manfaat. Maka, meskipun kebijakan ini telah memberikan kemudahan bagi aparat dalam proses identifikasi, kebijakan ini belum sepenuhnya cukup jika belum mampu menjamin bahwa seluruh keluarga miskin mendapatkan haknya secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kebijakan penempelan stiker keluarga miskin di Kelurahan Gunung Sari dapat dinilai cukup dari sisi teknis dan administratif dalam membantu proses identifikasi penerima bantuan. Keberadaan stiker, terlebih dengan tambahan barcode, memudahkan pelacakan domisili dan memperkuat transparansi. Namun demikian, apabila ditinjau dari sudut pandang penerima manfaat, kebijakan ini belum sepenuhnya memadai. Masih terdapat warga yang tidak memperoleh bantuan meski rumahnya telah ditempel stiker, serta munculnya ketidaknyamanan akibat stigma sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan kebijakan belum tercapai secara menyeluruh. Sejalan dengan teori Dunn dan Wibawa, kondisi ini menegaskan pentingnya audit dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara substantif.

d. Perataan (*Equity*)

Menurut Dunn *perataan* (equity) merupakan kriteria penting yang menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu memberikan manfaat secara adil dan merata kepada seluruh kelompok sasaran. Perataan bukan hanya menitikberatkan terhadap tercapainya target secara numerik, melainkan pada distribusi hasil kebijakan secara sosial dan spasial, termasuk keadilan dalam akses, penerimaan, dan perlakuan. Kebijakan dinilai berhasil secara merata apabila semua pihak yang berhak menerima mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa diskriminasi, pengecualian, atau

ketimpangan distribusi yang tidak dapat dibenarkan.

Dalam pelaksanaan kebijakan penempelan dan pelepasan stiker keluarga miskin di Kelurahan Gunung Sari, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini secara umum telah menjangkau sebagian besar kelompok sasaran. Mayoritas warga yang tergolong sebagai keluarga miskin telah ditempeli stiker, dan proses pelepasan juga telah dilakukan secara bertahap ketika kondisi ekonomi warga mengalami perubahan. Hal ini dapat dikatakan bahwa upaya pemerataan secara prinsip telah dilakukan, baik dalam tahap awal pemasangan maupun pada tahap pembaruan data melalui pelepasan stiker.

Namun, apabila dianalisis lebih dalam berdasarkan teori Dunn, perataan bukan hanya berarti "majoritas" telah terlayani, tetapi juga memperhatikan apakah terdapat kelompok tertentu yang secara sistemik atau struktural mengalami hambatan dalam mengakses kebijakan. Dalam kasus ini, hambatan tersebut terlihat pada kondisi warga yang tinggal di rumah kos atau kontrakan. Keberadaan pemilik rumah kos yang menolak rumahnya ditempeli stiker menjadi penghalang bagi pemerataan implementasi kebijakan, karena meskipun secara administratif warga tersebut tercatat sebagai penerima manfaat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan akses terhadap kebijakan berdasarkan jenis tempat tinggal. Warga yang tinggal di rumah milik sendiri atau di lingkungan tetap lebih mudah dijangkau kebijakan, sementara warga dengan mobilitas tinggi atau status tempat tinggal sementara seperti penghuni kos menjadi kelompok yang rawan terabaikan. Fenomena ini menggambarkan adanya bias struktural dalam kebijakan, di mana model implementasi yang bersifat seragam (melalui penempelan stiker fisik pada rumah) belum sepenuhnya adaptif terhadap variasi kondisi sosial-ekonomi dan pola hunian masyarakat miskin perkotaan.

e. Responsivitas

Dunn dalam teorinya tentang evaluasi kebijakan publik mendefinisikan responsivitas sebagai kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Responsivitas menjadi salah satu indikator penting karena kebijakan yang secara administratif berhasil sekalipun, belum tentu dianggap berhasil apabila tidak dapat merespon secara tepat realitas sosial dan harapan masyarakat. Dengan kata lain, responsivitas mencerminkan kemampuan kebijakan dalam memberikan kepuasan kepada penerima manfaat, termasuk memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan kultural masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan penempelan stiker keluarga miskin di Kelurahan Gunung Sari menunjukkan dinamika respons masyarakat yang cukup beragam. Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa terdapat sebagian masyarakat yang menerima kebijakan ini dengan baik karena stiker dianggap mempermudah proses penyaluran bantuan sosial. Mereka melihat stiker sebagai bukti administratif yang menunjukkan bahwa

mereka termasuk dalam daftar penerima manfaat, sehingga proses pemberian bantuan dapat dilakukan secara lebih tertib dan tepat sasaran.

Salah satu aspek penting yang menunjukkan tingkat responsivitas kebijakan adalah penolakan masyarakat terhadap penempelan stiker di rumah mereka. Penolakan ini tidak bisa dipandang sebagai hambatan semata, melainkan sebagai indikator bahwa kebijakan belum sepenuhnya menjawab nilai dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Sebagian warga menolak karena merasa malu, tidak nyaman, atau takut terhadap stigma sosial yang ditimbulkan dari label “keluarga miskin” yang secara kasat mata melekat pada rumah mereka. Penolakan ini mencerminkan adanya sensitivitas sosial yang belum diakomodasi oleh pelaksana kebijakan. Selain itu, terdapat juga warga yang merasa tidak layak dikategorikan sebagai miskin.

Namun demikian, respon positif tidak berlaku secara merata. Dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan bahwa sebagian masyarakat justru merasakan ketidaknyamanan dengan keberadaan stiker tersebut, hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber langsung. Beberapa warga menolak stiker karena merasa tidak nyaman apabila status ekonominya ditampilkan secara terbuka di lingkungan tempat tinggal. Bahkan terdapat kasus di mana warga melepas stiker secara mandiri karena perasaan malu.

Fenomena ketidaknyamanan ini tidak hanya terjadi di Kelurahan Gunung Sari, tetapi juga tercermin di beberapa daerah lain dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Utari et al., 2024) di Kecamatan Tanjung Pinang Timur tercatat ada sebanyak 178 anggota penerima PKH, yang rumahnya dilabelisasi memilih mengundurkan diri secara sukarela atau menggraduasi diri karena keberatan terhadap pelabelan rumah. Selain itu, temuan serupa juga ditemu oleh (Hidayat et al., 2022) di Tanjung Durian, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, di mana penerima bantuan PKH merasa canggung berinteraksi di lingkungan sosial, menjadi bahan pembicaraan, dan mengalami perendahan martabat oleh masyarakat sekitar. Meskipun status tersebut memberi peluang untuk mendapatkan beasiswa atau bantuan lainnya di masa depan, dampak sosial negatif yang dirasakan menunjukkan bahwa kebijakan pelabelan belum sepenuhnya responsif terhadap nilai-nilai sosial dan psikologis masyarakat penerima manfaat. Hal ini menjadi cerminan nyata bahwa penolakan masyarakat terhadap kebijakan semacam ini bukanlah fenomena tunggal atau bukan hanya terjadi di wilayah Kelurahan Gunung Sari.

Selain itu, masih terdapat masyarakat yang merasa belum menerima bantuan meskipun rumahnya sudah ditempeli stiker. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, sehingga mengurangi rasa percaya terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, dalam kasus rumah yang dihuni lebih dari satu keluarga, distribusi stiker yang tidak merata (hanya satu kepala keluarga yang

memperoleh) menimbulkan kesan ketidakadilan. Terdapat pula warga yang merasa khawatir tidak akan menerima bantuan lagi setelah stikernya dilepas, meskipun kondisi ekonominya belum membaik.

Meski demikian, terdapat pula masyarakat yang bersikap netral atau tidak mempermasalahkan keberadaan stiker. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka memahami fungsi administratif stiker, dan tidak merasa dirugikan selama bantuan tetap dapat diakses. Bahkan ada yang menilai bahwa keberadaan stiker justru membantu mempercepat proses penyaluran bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa dari sisi responsivitas, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Perbedaan persepsi masyarakat memperlihatkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal penerimaan sosial.

Jika dikaji menggunakan teori Dunn kriteria responsivitas baik dalam hal pelaksanaan pemasangan atau penempelan belum sepenuhnya memenuhi kriteria responsivitas sebagaimana dikemukakan oleh Dunn. Meskipun kebijakan ini telah memberikan manfaat dalam pendataan dan penyaluran bantuan. Namun, masih terdapat gap antara kebijakan dan persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan penempelan dan pelepasan stiker keluarga miskin di Kelurahan Gunung Sari belum sepenuhnya memenuhi kriteria responsivitas sebagaimana dikemukakan oleh Dunn. Meskipun kebijakan ini telah memberikan manfaat dalam hal pendataan dan penyaluran bantuan, respons masyarakat menunjukkan adanya ketidaknyamanan, penolakan, hingga pelepasan stiker secara mandiri karena rasa malu atau khawatir tidak lagi menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab nilai-nilai, harapan, dan kondisi sosial masyarakat.

f. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan (*appropriateness*) Ketepatan diartikan Dunn sebagai sejauh mana suatu kebijakan benar-benar sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan dan kondisi nyata dari kelompok sasaran kebijakan. Pada kriteria ketepatan tidak hanya diukur dari kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan, tetapi juga menilai apakah bentuk intervensi kebijakan merupakan cara yang paling relevan dan layak untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Hasil penelitian di Kelurahan Gunung Sari menunjukkan bahwa dalam proses pemasangan stiker keluarga miskin dilakukan di Kelurahan Gunung Sari, diketahui bahwa pada tahap pemasangan stiker keluarga miskin kebijakan ini telah berjalan relatif tepat sasaran. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan warga yang rumahnya dipasangi stiker, yang pada umumnya menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka memang tergolong miskin. Sebagai contoh, Pak Hari menyampaikan bahwa dirinya telah lama tidak bekerja dan merasa bahwa pemasangan stiker tersebut memang sesuai dengan kondisi keluarganya. Hal

senada juga disampaikan oleh Ibu Suyati yang menilai bahwa pemasangan stiker saat itu memang mencerminkan kondisi ekonomi yang ia alami. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa kelompok sasaran yang dipilih untuk dipasangi stiker sesuai dengan tujuan awal kebijakan, yakni menandai rumah tangga miskin agar lebih mudah dalam proses pendataan dan pemberian bantuan sosial.

Lebih lanjut, pihak juga melakukan verifikasi lapangan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Kelurahan Gunung Sari yang menjelaskan bahwa proses pemasangan dilakukan setelah pendataan dan observasi langsung oleh pihak kelurahan. Ibu T selaku Kader Sosial Humanis (KSH) juga menegaskan bahwa terdapat koordinasi dan prosedur dari Dinas Sosial yang menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang layak dipasangi stiker. Dengan demikian, terdapat upaya dari pelaksana kebijakan untuk menyesuaikan data administratif dengan kondisi aktual di lapangan, sebagaimana yang ditekankan oleh Dunn, bahwa sebuah kebijakan yang tepat harus memperhatikan konteks dan dinamika sosial dari kelompok sasaran. Hal ini selaras dengan hasil studi yang dijalankan (Andriani et al., 2024) yang menemukan bahwa keberhasilan kebijakan labelisasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Bener Meriah sangat dipengaruhi oleh proses pelabelan yang akurat dan terverifikasi. Mereka mencatat bahwa ketika pelabelan dilakukan berdasarkan observasi dan mekanisme pelibatan warga, maka target penerima manfaat lebih tepat sasaran.

Namun dalam tahap pelepasan stiker keluarga miskin, ketepatan kebijakan menjadi persoalan. Sebagian masyarakat menyampaikan bahwa pelepasan stiker tidak sesuai dengan kondisi mereka saat ini. Hal ini menunjukkan antara penilaian administrasi dan realitas sosial-ekonomi yang sebenarnya. Situasi ini mencerminkan bahwa proses evaluasi dalam tahap pelepasan tidak berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan partisipatif yang cukup. Dalam konteks teori Dunn, hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk ketidaktepatan kebijakan akibat indikator dan instrumen penilaian yang kurang sensitif terhadap dinamika ekonomi mikro rumah tangga. Ketika proses pelepasan dilakukan hanya berdasarkan klasifikasi administratif, tanpa mempertimbangkan data terkini yang bersumber dari warga itu sendiri, maka kebijakan berisiko tidak akurat dalam menentukan siapa yang masih layak menerima bantuan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan penempelan stiker keluarga miskin di Kelurahan Gunung Sari sudah tidak lagi aktif dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun, evaluasi terhadap kebijakan ini tetap penting sebagai masukan untuk kebijakan serupa di masa depan] khususnya di Kelurahan Gunung Sari. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam kriteria dari Dunn sebagai berikut:

1. Efektivitas

Diperlukan penyusunan prosedur pelaksanaan kebijakan yang terdokumentasi dengan baik melalui SOP atau pedoman resmi. Hal ini mencakup tahap penetapan, pelaksanaan, dan penghentian stiker, serta pelaksanaan berita acara tertulis dalam proses pelepasan stiker. Selain itu, disarankan pengembangan aplikasi pelaporan daring untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan program.

2. Efisiensi

Ditekankan pentingnya pengelolaan waktu dan tenaga SDM secara merata melalui pemetaan jumlah keluarga miskin, pembagian tugas di tiap RW, dan evaluasi berkala pelaksanaan tugas untuk menjaga efisiensi kerja.

3. Kecukupan

Disarankan adanya integrasi data stiker dengan data bantuan sosial untuk memastikan keluarga miskin yang sudah ditandai memperoleh manfaat yang tepat. Pemerintah juga dianjurkan untuk mempertimbangkan penggunaan simbolisasi yang lebih netral seperti QR code guna mengurangi stigma.

4. Pemeratasan

Kebijakan perlu menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat urban, terutama bagi mereka yang tinggal di rumah sewa atau kos. Oleh karena itu, perlu adanya pendataan khusus, koordinasi dengan pemilik bangunan, dan penyusunan mekanisme khusus bagi hunian non-milik pribadi.

5. Responsivitas

Dibutuhkan saluran aspirasi atau pengaduan agar masyarakat bisa menyampaikan keluhan terhadap kebijakan secara aman. Selain itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap desain stiker agar tidak menimbulkan stigma sosial, misalnya dengan mengganti desain menjadi lebih netral dan informatif.

6. Ketepatan

Proses pelepasan stiker harus disertai verifikasi lapangan secara langsung dan keterlibatan aktif dari RT, RW, serta Kader Sosial Harapan (KSH). Dokumentasi hasil evaluasi juga perlu dilakukan melalui berita acara tertulis agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi riil warga.

Referensi

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, M. S. (2016). *TEORI & ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Alfabeta.*
- Andriani, W., Herizal, & Rassanjani, S. (2024). The Phenomenon of Congregational Graduation of PKH Recipients After the Labelling Policy. *Futurity of Social Sciences*, 2(4), 84–100. <https://doi.org/10.57125/FS.2024.12.20.05>
- Andrianus, F., & Alfatih, K. (2023). Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan: Analisis Data Panel 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 54–60. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.206>
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi.* Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). <https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/11631>
- Fitri, A., Mula Defi Saragih, A., Silitonga, A., & Frisnoiry, S. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Data Kemiskinan di Indonesia 5 Tahun Terakhir.* 8(1), 15737–15473. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14618>
- Hidayat, M. R., Rahmadani, S., & Erningsih, E. (2022). DAMPAK PEMBERIAN LABEL MISKIN KEPADA KELUARGA PENERIMA BANTUAN PKH DI JORONG TANJUNG DURIAN KEC. SANGIR JUJUAN KAB. SOLOK SELATAN. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 726. <https://doi.org/10.26418/jpsh.v13i2.57580>
- Husin, H. (2023). *ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK.* CV. Diva Pustaka.
- Ramadhan, M. K., Adnan, M., & Martini, R. (2024). “EVALUASI KEBIJAKAN STIKERISASI KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA.” *Journal of Politic and Governemnet Studies*.
- Utari, D. S., Rinah, S. A., Sigalingging, D. N., & Dwiniati. (2024). Dampak Kebijakan Labelisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Manfaat Bantuan PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 211–224. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.163>
- Dunn, William N. (2003). *William N. Dunn - Pengantar Analisis Kebijakan Publik*- Gadjah Mada University Press (2003). Gadjah Mada University Press.